

**PENETAPAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2018
(RENJA)**



**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**

Tahun 2018



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 468 /DISHUB- BKT/ 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4)

b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a"i diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2011-2015;
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2015- 2020.
33. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

Tahun 2018;

Kedua : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : Juni 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BUKITTINGGI



Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si

NIP. 196302031986031034

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kasih dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018, Keberadaan Renja Dinas Perhubungan ini dibuat dalam rangka Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bukittinggi.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2018 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait serta perangkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, April 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI**



Drs.ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP : 1963 03021986031034

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR..	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	1
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
	1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	7
	2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD	22
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	26
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd	30
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	38
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN.....	39
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	39
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	40
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	42
BAB IV	PENUTUP	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS)
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018 ini merupakan dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktivitas Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018, yang mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan Kegiatan, yang akan diaktualisasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Berbagai program dan kegiatan disusun secara optimal untuk memberikan pembinaan, penyuluhan dan penertiban serta penyediaan fasilitas penunjang kenyamanan dan keselamatan masyarakat, guna mewujudkan transportasi Kota Bukittinggi yang aman, tertib dan lancar sebagai pendukung potensi unggulan kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renja-SKPD Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008, perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi;
13. Peraturan WaliKota Bukittinggi No 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 dan program Renstra Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah memantapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagai salah satu SKPD yang mengemban fungsi perhubungan, yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kota.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD, serta susunan garis besar isi diokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi SKPD, dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan dan temuan-temuan setelah proses tersebut serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan penjelasan proses usulan program/kegiatan diperoleh dari pemangku kepentingan, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Memuat perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan serta sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan .

BAB IV. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota Bukittinggi pada tahun 2017 dilaksanakan terdiri dari 10 Program dengan 44 Kegiatan, adapun program yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
5. Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan.
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ.
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi dengan 1 tujuan, 2 sasaran, 8 strategi dan 14 kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016- 2021(Renstra Dishub dalam revisi). Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kota Bukittinggi**

T.c.29

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2017		Catatan Perkiraan Realisasi 2017
					Target Renja SKPD tahun 2016	Realisasi Renja SKPD 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target 2017 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
1	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	98%	97%	97%			97%			

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, materai dan benda pos terbeli		97%	4 item	4 item	100%	4 item	4 item	100%	
\	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, air dan fax dibayar		97%	36 rekening	36 rekening	100%	36 rekening	36 rekening	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Service, suku cadang, BBM dan pajak kendaraan		97%	6 roda 4 11 roda 2	6 roda 4 11 roda 2	95%	6 roda 4 11 roda 2	6 roda 4 11 roda 2	95%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat kebersihan		97%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa peralatan kerja		97%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		97%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Barang cetak dan pengadaan		97%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Alat listrik dan elektronik		97%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
	Penyediaan makanan dan minuman	-makan minum - snack		97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Rapat-rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Konsultasi keluar kota bukittinggi	Terlaksanya rapat koordinasi, konsultasi, perjalanan dinas ke luar daerah		97%	80%	80%	100%	95%	95%	100%	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Honor non PNS		100%	13orang	12 orang	100%	20 orang	20 orang	100%	
	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana dishubkominfo		80%	4 item	4 item	80%	4 item	4 item	100%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase tersedianya sarana prasarna aparatur	85%	100%	85%			85%			
	Pengadaan Mobiller	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	8 kursi pimpinan 10 kursi staf	80%	100%	-	-	-	-	-	
	Pengadaan peralatan kantor	10 HT		80%	100 %	-	-	2 buah	2 buah	100%	
	Rehabilitasi gedung Gantor	1 Paket			100%						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

III	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia	Meningkatnya SDM PNS	100%	100%				100%			
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kursus-singkat dan pelatihan	12 bln	100%							
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%				100%			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip		100%	4 eks	4 eks	100%	4 eks	4 eks	100%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan		100%	2 eks	2 eks	100%	2 eks	2 eks	100%	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	RENJA dan RKA		100%	7 eks	7 eks	100%	7 eks	7 eks	100%	
	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2010-2015	Renstra						15 eks	15 eks	100%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Tahunan		100%	2 eks	2 eks	100%	2 eks	2 eks	100%	
V	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Optimalisasi fasilitas perhubungan	70%	70%				71%			

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Terwujudnya ketertiban angkutan umum dan terciptanya kebersihan lokasi terminal / parkir		72%	12 bulan	12 bulan	60%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Penunjang operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Tersedianya prasarana pendukung administrasi UPTD		72%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Pengelolaan Gedung Parkir	Peningkatan pelayanan gedung parker		72%	12 bulan	12 bulan	50%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Pengadaan Road Barrier	Tersedianya road barrier pembatas arus	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	100%	1 paket	100 %	
	Pengadaan Rubber Sped Humm/pita Kejut/pita pengaduh	Tersedianya Pita pengaduh	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	100%	1 paket	100 %	
	PengadaanTraffic Light	Tersedianya Traffic light di persimpangan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	100%	1 paket	100 %	
VI	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas	100%					90%			

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terlaksananya pemeliharaan fasilitas pendukung lalu 6, vlintas		100%	12 bulan	12 bulan	95%	12 bulan	12 bulan	100%	
	DAK Bidang keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015		12 bln								
	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS		1 paket	100							
VII	Program Pelayanan Angkutan	Optimalisasi pelayanan angkutan	100%	90%				100%			
	Pemilihan awak kendaraan umum teladan	Awak kendaraan umum teladan		20	3 orang	3 orang	100%	3 orang	3 orang	100%	
	Pendataan Angkutan Barang (Bermotor/Tidak Bermotor)	Informasi/data angkutan barang		100%	I doc	1 doc	60%	I doc	1 doc	100%	
	Pembinaan pengemudi angkutan barang tidak bermotor	Terbinanya pengemudi angkutan barang tidak bermotor		30 org							
	Pembuatan Sistem Informasi Angkutan Kota di Bukittinggi	Peta Jaringan Trayek angkutan						1 Dok	100	100	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

		Kota									
	Survey Jaringan Trayek dan Load Facktor	Jaringan Trayek									
	Pengadaan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan	Kanopi dan kursi tunggu									
	Penyuluhan Angkutan umum	Terbinanya pengemudi angkutan umum/angkutan kota		82 %	1 kgt	1 kgt	100%	1 kgt	1 kgt	100%	
	Pendataan Perbengkelan di Kota Bukittinggi	Informasi/Data perbengkelan		100	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	
	Pengadaan Stiker Papan trayek angkutan	Informasi trayek angkutan		82 %	1078 bh	1078 bh	100	1078	1078	100	
	Evaluasi kinerja angkutan umum	Data angkutan umum dalam jaringan trayek		82 %	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	
	Penataan dan pengembangan jaringan trayek angkutan kota	Penataan jaringan trayek angkutan kota		82 %				1 dok	1 dok	100%	
	Rancangan induk Jaringan lalulintas kota bukittinggi	Rencana induk jaringan lalu lintas kota		82 %				1 dok	1 dok	100%	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Temu wicara Angkutan umum	Pertemuan pengurus koperasi dan organda		12 kali	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
VIII	Program Pembangunan dan sarana perhubungan										
	Pemangunan zona selamat sekolah			1 paket				1 Paket	1 Paket	100	
IX	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas	95%	85%				95%			
	Lomba tertib lalu lintas	WTN		1 dokumen	-	-	-	1	1	100%	
	Pengendalian lalu lintas Kota Bukittinggi	Terlaksananya pengendalian lalu lintas		31 org	12 bulan	0	0%	12 bulan	12 bulan	100%	
	Sosialisasi/Penyuluhan lalu lintas	Peserta penyuluhan yang tertib berlalu lintas		72 %	12 bulan	12 bulan	100%		-	-	
	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Terlaksananya penyuluhan lalu lintas		30 org	15 sekolah	15 sekolah	100 %	15 sekolah	15 sekolah		
	Pendataan rambu Lalu Lintas	Data jumlah rambu-rambu lalu lintas									

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

	Pengadaan Road Bearier	Tersedianya road bearier									
	Pengecatan marka jalan	Pengecatan marka jalan		100%	1 paket	1 paket	100%	-	-	-	
	Pengecatan marka jalan (pita kejut) depan masjid baitu rahman	Tersedianya pita kejut		100%	1 paket	1 paket	0%	-	-	-	
X	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Optimalisasi kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100%	100%				100%			
	Penunjang Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya penunjang Operasional Unit Pengujian Kendaraan bermotor		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	

Jika dilihat dari realisasi keuangan kegiatan tahun 2016 dimana dari 56 kegiatan tidak dapat terealisasi secara keseluruhan, pencairan dana program dan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Realisasi 100 % | = 12 kegiatan |
| 2. Realisasi 85 - <100% (baik) | = 26 kegiatan |
| 3. Realisasi 70 - <85% | = 11 kegiatan |
| 4. Realisasi 0 - < 70% | = 6 kegiatan |

Anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebesar Rp. 10.392.761.085,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.256.537.238,- atau 70%.

Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016, tentu saja ini berpengaruh terhadap capaian kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2017 dengan perubahan SOTK tahun 2017 Dishubkominfo dipisah menjadi dua dinas yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo sehingga program dan kegiatan dibagi menurut Urusan masing-masing sesuai dengan perubahan Renstra 2017. Program Kegiatan Dinas Perhubungan adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan , dengan kegiatan :
 1. Peningkatan pengelolaan terminal/ parkir
 2. Pembangunan pos keamanan terminal
 3. Penunjang operasional administrasi UPTD terminal dan parkir
 4. Pengadaan Rambu lalu lintas
 5. Pengadaan road barrier
 6. Pengadaan Rubber speed hump
 7. Pengadaan traffic light
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :
 1. Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu lalu lintas.
 2. DAK Bidang keselamatan Transportasi darat
 3. Perbaikan dan pemeliharaan ACTS
3. Program Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan :
 1. Pemilihan awak kendaraan umum teladan

2. Penyuluhan angkutan umum
3. Evaluasi kinerja angkutan umum
4. Penataan dan pengembangan jaringan trayek angkutan kota
5. Rancangan induk jaringan lalulintas kota Bukittinggi
6. temu wicara Pengelola angkutan umum
7. Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor
8. Up Date data perbengkalan
4. Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan
 1. Pembangunan zona selamat sekolah
 2. kajian Manajemen persimpangan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan:
 1. Lomba tertib lalu lintas
 2. Pengendalian Lalu Lintas Kota Bukittinggi
 3. pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalulintas
 4. Penerangan penyuluhan lalu lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan :
 1. Penunjang Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan stakeholder kota dalam bidang perhubungan. Guna mewujudkan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Perhubungan telah menyusun dan menetapkan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan secara profesional dan komprehensif, sehingga pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dapat terealisasi dengan optimal.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat dan diukur dengan evaluasi kinerja terhadap 2 sasaran yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan kelancaran berlalulintas
2. Meningkatnya Kualitas Angkutan jalan

Adapun Indikator Kinerja pelayanan SKPD untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah :

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1. Persentase Peningkatan jalan bebas hambatan (Kemacetan)
2. Indek Kepuasan Masyarakat

Dari 3 Indikator tersebut semuanya dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat Baik	0
2	85% sd < 100%	Baik	2
3	70% sd < 85%	Sedang	0
4	0 sd < 70%	Kurang Baik	0

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK(PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisi
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Persentase peningkatan jalan bebas hambatan (Kemacetan)			100 %	90 %	80 %	70 %	90 %	80 %	70 %	60 %	
3.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Analisa capaian / evaluasi kinerja terhadap 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGE T	REALISA SI
1.	Persentase peningkatan jalan bebas hambatan (Kemacetan)	90%	88 %

Hambatan Tercapainya indikator sasaran ini adalah :

- Tingkat kemacetan lalu lintas kota masih dapat dikendalikan dengan cara mengoptimalkan sarana pendukung lalu lintas yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
- Kemacetan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu (liburan).
- Untuk batas maksimal kecepatan dalam kota diatur dengan rambu-rambu lalu lintas
- Dibutuhkan tenaga teknis untuk perbaikan traffic light.

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik

Indikator dari Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah melihat sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan baik dari pelayanan Uji Ulang Kendaraan yang wajib uji pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor maupun pelayanan terhadap pengurusan izin trayek (Kartu Pengawas) angkutan umum yang beroperasi dikota Bukittinggi.

Sejauh ini belum ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan melalui kuisisioner survey yang diberikan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan umum yang membutuhkan layanan Dinas perhubungan.

2.3. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Bertolak dari perkembangan perencanaan tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi masih dihadapi dengan masalah dalam lingkup tugas – tugas di bidang perhubungan, yang meliputi sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Sistem lalu lintas angkutan jalan terdiri dari sub sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, yakni prasarana jalan, persimpangan dan terminal, serta sarana kendaraan untuk alat angkut dan manusia sebagai pemakai jalan. Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata sangat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi. Dalam hal ini rambu- rambu, marka, fasilitas pejalan kaki, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), pita penggaduh, pagar pengaman dan halte masih sangat dibutuhkan agar kelancaran lalu lintas dapat terjamin. Sementara itu, kebutuhan lahan parkir terutama pada saat–saat libur dan hari besar nasional tidak mencukupi, sehingga badan–badan jalan dipergunakan sebagai alternatif penempatan parkir kendaraan yang memasuki Kota Bukittinggi.

Pembangunan Gedung Parkir yang belum dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi masalah parkir dan kemacetan dalam kota Bukittinggi.

Jumlah kendaraan yang beroperasi dan berdomisili di dalam Kota Bukittinggi diperiksa dan diuji kelaikan jalannya pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Bukittinggi yang telah diserahkan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 01 Oktober 2005 kepada Kota Bukittinggi, yang saat ini masih memakai gedung dan peralatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Sementara Terminall tipe A Aur Kuning tererhitung Oktober 2016 diserahkan ke Pemerintahan Pusat.

Untuk memantau dan mengawasi kegiatan transportasi dalam Kota Bukittinggi ditugaskan personil – personil di lapangan terutama di titik – titik

rawan seperti Pasar Atas, Pasar Bawah, Terminal Simpang Aur dan persimpangan jalan pada jam – jam sibuk yang sering mengalami kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu lebih dibutuhkan pengetahuan dasar kelalulintasan bagi personil – personil Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan, setiap sikap mental dan percaya diri dapat ditingkatkan.

i. Isu- Isu strategis Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan tugas kedinasan isu-isu strategis baik dari dalam maupun luar Dinas Perhubungan antara lain :

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Dinas Perhubungan dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perhubungan yang mengemban amanat melaksanakannya. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi Dinas Perhubungan. Berdasarkan analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan di masa lima tahun yang akan datang.

Dari aspek kajian tersebut dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Perhubungan, Beberapa isu strategis yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, regional/lokal dan lingkungan lainnya adalah :

1. Isu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan di jalan raya menyebabkan tingginya angka kematian. Dibeberapa wilayah Kota Bukittinggi terdapat zona black spot (rawan kecelakaan), yang masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan di

daerah jalur lintas kota Bukittinggi dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Terkait tingginya angka kecelakaan, tentu saja hal ini erat hubungannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat akan tertib lalulintas dan juga kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, disamping perlu juga dilakukan penerangan dan sosialisasi terkait keselamatan lalu lintas. Disamping itu perlu juga dilakukan penjagaan kawasan- kawasan rawan kecelakaan dengan menempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.

2. Isu tingginya tingkat Kemacetan Lalu Lintas.

Lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh karena itu lalu lintas merupakan salah satu masalah penting. Apabila arus lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan-gangguan ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Lalu lintas merupakan suatu masalah sulit yang harus dipecahkan bersama dan sangat penting untuk segera diselesaikan. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul akibat masalah ini akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya.

Sebagai salah satu negara sedang berkembang, Indonesia seperti negara sedang berkembang lainnya mengalami permasalahan-permasalahan lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju, mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, kesenjangan sosial, hingga kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan itu sendiri. Kemacetan atau kongesti adalah salah satu diantaranya.

3. Isu Belum terpenuhinya sarana dan prasarana LLAJ

Sebagaimana disampaikan pada point sebelumnya, bahwa di Kota Bukittinggi masih tinggi angka kecelakaan lalu lintas yang salah satunya disebabkan kurangnya sarana fasilitas jalan. Oleh sebab itu, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal

25 ayat 1 berbunyi setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : a.Rambu Lalu Lintas, b.Marka Jalan, c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, d.Alat Penerangan Jalan, e.Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, f.Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki,dan Penyandang Cacat, h.Fasilitas pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka diperlukan pemenuhan terhadap fasilitas jalan tersebut.

Demikian juga halnya dengan perparkiran. Perparkiran bertujuan agar pergerakan lalulintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib sehingga pengaturan perparkiran juga menjadi prioritas untuk dibenahi.

4. Isu Kurangnya kualitas angkutan jalan

Sebagaimana telah digambarkan bahwa pada Kota Bukittinggi, dari 24 jalur trayek angkutan kota belum semua dilalui angkutan kota. Disamping itu masih terdapat pangkalan-pangkalan angkutan di luar terminal.

Disisi lain juga dalam menciptakan angkutan yang berkualitas diperlukan uji laik kendaraan dimana saat ini masih ada kendaraan yang tidak melakukan uji laik kendaraan serta permasalahan sarana dan prasarana penunjang itu sendiri yang masih dirasa kurang memadai. Kedepan diharapkan disamping setiap kendaraan angkutan umum mempunyai izin trayek serta lulus uji laik kendaraan.

5. Isu rendahnya kualitas pelayanan Publik

Baik buruknya pelayanan tergantung kepada kualitas sumber daya manusia (SDM) pemberi pelayanan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik sangat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas sebagai objek atau penikmat dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

Dalam hal ini, kedepannya akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kehebatan ataupun justru kelemahan-kelemahan pada unit-unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Keterbatasan luas terminal yang tidak memadai, dan ketidaktersediaan terminal angkutan barangurangnya sarana dan prasarana gedung parkir.
2. Daya tampung SRP tidak sebanding dgn kendaraan yang masuk ke Bukittinggi,
3. Rambu yang tersedia tidak mencukupi (masih sangat kurang) Untuk 196,68 km panjang jalan dengan \pm 375 ruas jalan. Menurut penilaian Lomba Tertib lalu Lintas kategori kota kecil : dibutuhkan rambu lalu lintas minimal 600 unit rambu, saat ini baru berjumlah 489 unit.
4. Masih adanya angkot yang belum layak jalan dan memerlukan peremajaan.
5. Perlunya peningkatan kualitas pengamanan lalu lintas dan koordinasi terpadu dengan instansi terkait
6. Masih kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan uji berkala kendaraan serta adanya kendaraan yang berdomisili di Bukittinggi melakukan uji di daerah lain.

2.3.2. Peluang dan Tantangan Eksternal

2.3.2.1. Peluang

1. Adanya Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
2. Adanya Undang- Undang Nomor 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Kota sebagai daerah otonom.
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.
5. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
7. Undang- Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/PR.008/PHB-87 tentang Kebijakan Umum Transportasi.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.
12. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan program perhubungan
13. Tersedianya Dukungan dana dari sumber APBD, APBD TK I dan APBN

2.3.2.2. Tantangan

1. Masih terbatasnya tenaga transportasi dan komunikasi yang memiliki kompetensi dibidangnya.
2. Terbatasnya lahan parkir yang mengakibatkan kendaraan pengunjung memarkirkan kendaraan di badan jalan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan kegiatan yang terdapat dalam Rancangan awal RKPD tahun 2016 pada umumnya telah sesuai dengan RKA 2016. Disamping program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap SKPD, program untuk dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Program yang dilaksanakan berkesinambungan dengan program pada tahun 2016 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2016- 2021. Capaian kinerja pada tahun 2017 belum tercapai dengan maksimal, sehingga masih dibutuhkan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sama pada tahun 2016. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan diantaranya pengadaan sarana dan prasarana gedung parkir. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKAT OR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
						-	Penyediaan jasa surat menyurat	Bukittinggi	Materai 3000 Materai 6000 Pengadaan buku cek dan materai benda Pos lainnya dan pengiriman surat	250 buah 200 buah 10 buah 1 ls	3.350.000	
						-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukittinggi	jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	139.000.000	
						-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bukittinggi	Servis, suku cadang, bbm, pajak	6 roda unit 4, 12 roda 2	167.406.433	
						-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bukittinggi	Alat/ bahan dan jasa kebersihan	12 bulan	6.727.200	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

						-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bukittinggi	Servis komputer, printer, laptop, HT dan mesin tik	12	bulan	20.000.000	
						-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	alat tulis kantor	12	bulan	19.387.500	
						-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bukittinggi	cetakan dan penggandaan	12	bulan	52.771.000	
						-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bukittinggi	Alat listrik dan elektronik	12	bulan	3.102.000	
						-	Penyediaan makanan dan minuman	Bukittinggi	makan dan minum harian pegawai, lembur dan rapat	1	ls	6.900.000	
						-	Rapat-rapat kordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi luar kota Bukittinggi	Bukittinggi	perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	tahun	200.000.000	
						-	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	honor pekerja kontrak dan asuransi	12	bulan	326.708.304	
						-	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	Honor PPHP, PPK, PTK, Pejabat pengadaan	12	bulan	10.507.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

						-	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bukittinggi					
						2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
						-	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	Frame foto	1	ls	300.000	
						-	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	Laptop	1	ls	25.000.000	
						-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub	Bukittinggi	Perencanaan gedung kantor	1	ls	300.000.000	
						3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	i				-	
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Bukittinggi	Pakaian dinas, sepatu pdh dan pakaian olah raga	128	stel	153.000.000	
						4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN, CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN						
							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bukittinggi	Lakip	5	buku	1.537.800	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

							Penyusunan laporan keuangan semesteran	Bukittinggi	Meningkatnya pelaporan kinerja semesteran	2 buku	744.400	
							Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Bukittinggi	renja	5 buku	1.456.000	
							Penyusunan renstra SKPD	Bukittinggi				
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Bukittinggi	Tersediannya informasi keuangan tahunan SKPD	2 buku	1.215.800	
						5	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN					
							Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan dan pengawasan terminal parkir	1 tahun	2.630.069.000	
							Penunjang Operasional dan Administrasi Terminal dan Parkir	Bukittinggi	Peningkatan pelayanan aparaturnya terminal dan parkir	1 tahun	128.884.900	
							Pengelolaan Gedung Parkir	Bukittinggi	Pelayanan Parkir	1 ls	1.386.367.500	
							Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Bukittinggi	Persentase pemenuhan cermin tikung	1 paket	200.000.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

							Pengadaan Road Barrier	Bukittinggi	Persentase pemenuhan road barrier jalan kota	1 paket	200.000.000	
							Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita Kejut/Pita Penggaduh	Bukittinggi	Persentase pemenuhan pita penggaduh	1 paket	200.000.000	
							Pengadaan Traffic Light	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan	1 paket	654.000.000	
						6	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ					
							Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (DAK Tahun 2016)	Bukittinggi				
							Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	Bukittinggi	Rambu lalu lintas yang layak	1 tahun	263.607.900	
							DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	Bukittinggi	Persentase pemenuhan marka jalan kota	1 paket	1.067.504.559	
							Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)	Bukittinggi	Persentase penurunan konflik di persimpangan	1 paket	337.000.000	
						7	PROGRAM PENINGKATAN					

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

							PELAYANAN ANGKUTAN						
							Pemilihan awak kendaraan umum Teladan	Bukittinggi	Meningkatnya Pelayanan awak kendaraan umum	20	orang	41.268.100	
							Penyuluhan Angkutan Umum	Bukittinggi	Terbinanya pengemudi angkutan umum/angkutan kota	1	KEG	6.622.900	
							Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Bukittinggi	Persentase angkutan kota yang beroperasi sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2016	75	%	12.803.000	
							Pendataan angkutan barang (bermotor dan tidak bermotor)	Bukittinggi					
							Pendataan perbengkelan kota Bukittinggi	Bukittinggi					
							Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan	Bukittinggi	Papan trayek	1078		30.400.000	
							Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan umum yang beroperasi tidak melebihi	1	dok	99.956.000	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

									daya angkutan				
							Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Bukittinggi	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan trayek angkutan kota	1	dok	250.000.000	
							Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota yang beroperasi sesuai dengan lintasan trayek dalam kota	1	dok	250.000.000	
							Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Bukittinggi	Persentase kendaraan angkutan kota beroperasi sesuai dengan PERDA No.6 Tahun 2016	12	kali	9.984.000	
							Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Bukittinggi	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan tidak bermotor	30	orang	14.857.600	
							Pembuatan Plat Kendaraan Non Bermotor/ Bendi						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

						8	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN						
							Pembangunan Zona Selamat Sekolah	Bukittinggi	Persentase pemenuhan zona selamat sekolah	1	paket	200.000.000	
						9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						
							Lomba Tertib Lalu Lintas	Bukittinggi	WTN	1	Keg	47.558.200	
							Penerangan/ Penyulunan lalu lintas	Bukittinggi	Meningkatnya kesadaran berlalu lintas	12	Sekolah	3.725.100	
							Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Bukittinggi	Terpilihnya pelajar pelopor Keselamatan lalu Lintas	15	sekolah	44.451.000	
							Pengendalian Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Bukittinggi	Terkendalinya lalu lintas	1	tahun	508.256.000	
							Pengadaan Trafict Light	Bukittinggi					
							Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung						
							Pengadaan Road Barrier						

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

						Pengadaan Warning Light					
					10	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR					
						Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	Bukittinggi	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum	12 bulan	196.869.600	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional bidang transportasi merupakan tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Untuk Kota Bukittinggi dengan spesifikasi daerah perbukitan dan tidak mempunyai angkutan udara serta perairan, masalah transportasi yang dihadapi adalah bidang transportasi perkotaan dan bidang angkutan jalan.

Arah pengembangan transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara system angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Sementara untuk angkutan jalan diperlukan pengembangan jaringan transportasi jalan primer untuk meningkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas.

Adapun kebijakan Infrastruktur transportasi darat di tingkat nasional adalah :

1. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa transportasi darat. Mengupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi darat.
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan perundang- undangan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi darat.

4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi darat yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Dengan adanya arah kebijakan infrastruktur transportasi darat tersebut antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah tingkat II mempunyai batasan kewenangan penyelenggaraan, dan yang menjadi kewenangan daerah tingkat II sebagai berikut :

1. Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
2. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
Penetapan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan
3. Pengujian Kendaraan bermotor
Pengujian berkala kendaraan bermotor
4. Penyediaan Angkutan Umum
Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam wilayah kota.

Permasalahan yang berlaku umum dalam bidang transportasi darat dan sesuai dengan Penjelasan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah : *Lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah sbb : "*Terwujudnya sistim transportasi yang berkualitas*".

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas
2. Meningkatnya Kualitas Angkutan jalan

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.	Penyediaan jasa surat menyurat
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.	Penyediaan makanan dan minuman
11.	Rapat-rapat kordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi
12.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
13.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15.	Pengadaan peralatan kantor
16.	Pengadaan mebeleur

17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dishub
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan pelatihan formal
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.	Penyusunan laporan keuangan semesteran
22.	Penyusunan DPA dan DPPA SKPD
23.	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD
24.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
V.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
25.	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir
26.	Penunjang Operasional dan Administrasi Terminal dan Parkir
27.	Pengelolaan gedung parkir
28.	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
29.	Pengadaan Road Barrier
30.	Pengadaan Rubber Speed Humb / Pita Kejut
31.	Pengadaan Traffic Light
32.	Pengadaaan Warning Light
VI.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
33.	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas
34.	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)
35.	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)
VII.	Program peningkatan pelayanan angkutan
36.	Pemilihan awak kendaraan umum Teladan
37.	Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
39.	Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan
40.	Evaluasi Kinerja angkutan Umum
41.	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota
42.	Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi

43.	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
44.	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor
45.	Up Date Perbengkelan
VIII.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
46.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah
47.	Kajian Manajemen Persimpangan
IX.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
46.	Lomba Tertib Lalu Lintas
47.	Penerangan/Penyuluhan Lalu Lintas
48.	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
49.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
X.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
50.	Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA BUKITTINGGI**

Form 3.3

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018(N)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NON URUSAN				1.191.966.537				1.938.000.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	DISHUB	100%	1.091.966.537			100%	1.568.000.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, materai, buku cek	Dishub	3 item	3.350.000	APBD		3 item	5.000.000
2	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	Rekening Telepon, Air dan Listrik Terbayar (36 Rekening)	Dishub	4 jenis rekening	139.000.000	APBD		4 jenis rekening	175.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara	Dishub	6 kend roda 4, 16 kend. Roda 2	148.074.433	APBD		6 kend roda 4, 16 kend. Roda 2	200.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Yang Bersih	Dishub	4 org	103.760.800	APBD		4 org	150.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	Perlengkapan kantor terpelihara	Dishub	53 item	10.000.000	APBD		53 item	35.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

	dan Perlengkapan Kantor								
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli	Dishub	47 item	14.604.000	APBD		47 item	40.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	Dishub	18 item	25.960.000	APBD		18 item	65.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jenis barang Penerangan Kantor terbeli	Dishub	11 item	3.102.000	APBD		11 item	5.000.000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	3.000.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan	Dishub	12 Bulan	6.900.000	APBD		12 Bulan	20.000.000
11	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti	Dishub	100%	200.000.000	APBD		100%	400.000.000
12	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tenaga Non PNS	Dishub	13 orang	326.708.304	APBD		13 orang	450.000.000
13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP,PPk,PTK	Dishub	12 orang	10.507.000	APBD		12 orang	20.000.000
14	Penyediaan jasa keamanan	tenaga keamanan kantor	Dishub	4 orang	100.000.000	APBD		4 orang	120.000.000
15	Pendataan dan penataan arsip	Menyelamatkan dan melestarikan arsip	Dishub	4 orang		APBD		4 orang	18.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	Dishub	100%	549.000.000			100%	460.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional yang dibeli	Dishub	3 Unit		APBD		3 Unit	300.000.000
2	Pengadaan Peralatan Kantor	HT dan mesin Absensi	Dishub	10 bh	49.000.000	APBD		10 bh	50.000.000
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	50.000.000
4	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	60.000.000
5	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	
6	Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor Yang Layak dan Nyaman	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	
7	Pengadaan gedung baru kantor	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Dishub	1 Paket	500.000.000			1 Paket	15.000.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Dishub	100%	-			100%	250.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terciptanya Aparatur Yang Berwibawa	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	250.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dishub	100%	-			100%	80.000.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis	Dishub	1 Kegiatan		APBD		1 Kegiatan	80.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Dishub		4.050.700				8.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terukurnya Capaian Kinerja SKPD	Dishub	1 Dokumen	1.487.500	APBD		1 Dokumen	2.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan SKPD Semesteran	Dishub	2 Laporan	659.400	APBD		2 Laporan	1.500.000
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	Adanya Pedoman/ uan Pelaksanaan KegiAcatan 5 Tahunan	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Adanya Acuan dan Pedoman Untuk Pelaksanaan Kegiatan 1 Tahun	Dishub	2 Dokumen	1.203.000	APBD		2 Dokumen	2.000.000
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	Dishub	1 Laporan	700.800	APBD		1 Laporan	2.500.000
	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN		Dishub		7.132.261.350				12.655.000.000
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Memadai	Dishub	100%	4.811.317.900	APBD		100%	9.810.000.000
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	Pelayanan terminal dan parkir	Dishub	117 orang	2.646.990.000	APBD		117 orang	3.000.000.000
2	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terminal dan Parkir	Dishub	90 item	619.277.100	APBD		90 item	800.000.000
3	Pengelolaan Gedung parkir	Terkelolanya Gedung Parkir Dengan Baik	Dishub	12 Bulan	531.140.000	APBD		12 Bulan	1.000.000.000
4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Petunjuk dan Larangan	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	400.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

	Pengadaan dan pemasangan Guadril	Tersedianya pembatas bahu jalan yang kritis	Dishub	1 Paket	-			1 Paket	
5	Pengecatan Marka Jalan	Tersedianya Marka Petunjuk Jalan	Dishub	1 Paket	595.910.800	APBD		1 Paket	1.300.000.000
6	Pengadaan Road Barrier	Tersedianya Road Barrier Pembatas Arus	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	260.000.000
7	Pengadaan Rubber Speed Humb	Tersedianya Rubber Speed Humb Pengendali Kecepatan Kendaraan Pada Lokasi Rawan Kecelakaan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	250.000.000
8	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	Tersedianya RPPJ	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	200.000.000
9	Pengadaan Traffic Cone	Tersedianya Alat Pengarah dan Pengatur Lalu Lintas	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	-
10	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	Tersedianya Alat Bantu Pandang Pada Tikungan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	
11	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedianya Rel Pembatas Bahu Jalan Pada Bahu Jalan Yang Kritis	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	300.000.000
12	Pengadaan Warning Light	Tersedianya Peringatan Pada Lokasi Rawan Kecelakaan	Dishub	1 Paket	218.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
13	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya Traffic Light Untuk Pengaturan Lalu Lintas di Persimpangan	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	2.000.000.000
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas	Prasarana dan fasilitas perhubungan dapat berfungsi dengan baik	Dishub		650.000.000				700.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

	LLAJ								
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	Dishub	12 Bulan	650.000.000	APBD		12 Bulan	700.000.000
2	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	Dishub						
3	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Traffic Control System)	Terpeliharanya Fasilitas LLAJ	Dishub						
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishub	100%	249.727.250			100%	2.000.000.000
1	Pembangunan Jembatan penyeberangan Orang	Tersedianya Jembatan penyeberangan Orang Untuk Mengurangi Konflik Lalu Lintas	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	
2	Penyusunan Kajian Jaringan Induk Transportasi Kota	Tersedianya Masterplan Jaringan Induk Transportasi Kota Bukittinggi	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
3	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	Tersedianya Ranperda Lalu Lintas	Dishub	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	-
4	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	Terciptanya Pengaturan Simpang Bersinyal Yang Terintegrasi Dengan System Smart City	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	1.200.000.000
5	Kajian Manajemen Persimpangan	Data Design Perbaikan manajemen Simpang	Dishub	1 Dokumen	49.727.250	APBD		1 Dokumen	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

6	Pembangunan dan Pengembangan Pedestrian	Fasilitas Bagi Pejalan Kaki	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	
7	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	ZOSS Pada Sekolah Yang Rawan Kecelakaan	Dishub	1 Paket	200.000.000	APBD		1 Paket	300.000.000
8	Pembangunan Halte	Tersedianya Halte	Dishub	1 Paket	-	APBD		1 Paket	500.000.000
IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan umum	Dishub		260.694.500				545.000.000
1	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	Tersedianya Gambaran Kinerja Angkutan Umum	Dishub	4 Dokumen		APBD		4 Dokumen	150.000.000
2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Akan Angkutan Umum	Dishub	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	-
3	Rancangan Induk Jaringan Lalu Lintas Kota Bukittinggi	Tersedianya Pedoman Jaringan Lalu Lintas Jangka Menengah	Dishub	1 Paket		APBD		1 Paket	-
4	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	Pengemudi angkutan umum yang dibina	Dishub	50 Orang	66.443.000	APBD		50 Orang	80.000.000
5	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	Oertemuan dengan Pengurus Koperasi dan Organda	Dishub	12 Kali	9.984.000	APBD		12 Kali	10.000.000
6	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	3 orang Awak Kendaraan Umum Teladan	Dishub	30 Orang	47.683.500	APBD		30 Orang	50.000.000
7	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	Data Perbengkalan yang akurat	Dishub	5 orang		APBD		5 orang	50.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

8	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Meningkatnya Pengetahuan Awak Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	Dishub	30 Orang	8.765.000	APBD		30 Orang	15.000.000
9	Up date data perbengkelan	Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	Dishub	1 dokumen	8.522.000			1 dokumen	10.000.000
10	Pemeriksaan lapangan dan pemosisan kartu pengawas angkutan kota	Kartu pengawas yang diterbitkan	Dishub	539 izin	119.297.000			539 izin	180.000.000
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya persentase ketertiban berlalu lintas	Dishub		1.111.228.050				1.100.000.000
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	Meraih Piala WTN	Dishub	1 Kegiatan	69.730.400	APBD		1 Kegiatan	70.000.000
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Lancarnya Lalu Lintas Kota	Dishub	12 Bulan	951.741.000	APBD		12 Bulan	900.000.000
3	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	Meningkatnya Kesadaran Berlalu Lintas	Dishub	12 Sekolah	30.485.050	APBD		12 Sekolah	50.000.000
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Dishub	1 Kegiatan	59.271.600	APBD		1 Kegiatan	80.000.000
XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kelaikan kendaraan umum			299.020.900				500.000.000
1	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	kelaikan kendaraan umum	Dishub	12 Bulan	299.020.900	APBD		12 Bulan	500.000.000
					9.027.005.837				17.021.000.000

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adapun Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	6	7
JUMLAH SELURUHNYA		13.531.971.322	
A	NON URUSAN	2.743.965.737	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.965.737	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Kom, SDA Air dan Listrik	139.000.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	150.074.433	APBD
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103.760.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	APBD
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.604.000	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.960.000	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.102.000	APBD
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.900.000	APBD
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas ke Luar Kota Bukittinggi	200.000.000	APBD
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	326.708.304	APBD
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10.507.000	APBD
13	Penyediaan jasa keamanan	100.000.000	APBD
14	Pendataan dan penataan arsip	0	APBD

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.445.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000.000	APBD
2	Pengadaan Peralatan Kantor	65.000.000	APBD
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.000.000	APBD
4	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	APBD
5	Pembangunan DED Gedung Kantor		APBD
6	Pemeliharaan Sedang/ Berat Gedung Kantor	0	APBD
7	Pengadaan gedung baru kantor	0	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	105.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	105.000.000	APBD
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	APBD
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	APBD
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	0	APBD
3	Penyusunan Rencana strategis SKPD	0	APBD
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	0	APBD
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	0	APBD
B	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN	10.788.005.585	
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6.239.136.185	
1	Peningkatan pengelolaan Terminal/Parkir	2.970.000.000	APBD
2	Penunjang Operasional Administrasi UPTD Terminal dan Parkir	252.996.185	APBD

3	Pengelolaan Gedung parkir	516.140.000	APBD
4	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	0	APBD
5	Pengecatan Marka Jalan	200.000.000	APBD
6	Pengadaan Road Barrier	200.000.000	APBD
7	Pengadaan Rubber Speed Humb	200.000.000	APBD
8	Pengadaan dan Penggantian RPPJ	0	APBD
9	Pengadaan Traffic Cone	0	APBD
11	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	0	APBD
12	Pengadaan Warning Light	200.000.000	APBD
13	Pengadaan Traffic Light	1.500.000.000	APBD
14	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung	200.000.000	
VII	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	700.000.000	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	700.000.000	APBD
2	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015)	0	
3	Perbaikan dan Pemeliharaan ATCS (Area Trafic Control System)	0	
VIII	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	550.000.000	
1	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	0	APBD
2	Penyusunan Kajian Jaringan Induk lalulintas kota Kota	300.000.000	APBD
3	Penyusunan Ranperda Lalu Lintas Darat	0	APBD
4	Pembangunan dan Pengembangan ATCS	0	APBD
5	Kajian Geometrik Persimpangan	50.000.000	APBD
6	Pembangunan dan Pengembangan	0	APBD

	Pedestrian		
7	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	200.000.000	APBD
8	Pembangunan Halte	0	APBD
IX	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	600.262.000	
1	Evaluasi Kinerja Angkutan Umum	80.070.000	APBD
2	Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota	380.000.000	APBD
4	Penyuluhan Bagi Para Sopir/ Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang	13.745.000	APBD
5	Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum	9.118.000	APBD
6	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan	52.614.000	APBD
7	Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan	40.000.000	APBD
8	Pembinaan Pengemudi Angkutan Tidak Bermotor	9.715.000	APBD
9	Up date data perbengkelan	15.000.000	
10	Pemeriksaan lapangan dan pemosesan kartu pengawas angkutan kota	0	APBD
X	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2.022.217.400	
1	Lomba Tertib Lalu Lintas	59.529.870	APBD
2	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.892.788.930	APBD
3	Penerangan/ Penyuluhan Lalu Lintas	16.432.600	APBD
4	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	53.466.000	APBD

XI	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	676.390.000	
1	Penunjang Operasional UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	676.390.000	APBD

BAB IV

P E N U T U P

Pelaksanaan Program, kegiatan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan didasarkan kepada visi dan misi organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, dan tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bukittinggi .

Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 serta rencana program dan kegiatan tahun 2018, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :

1. Sarana dan prasarana gedung Dinas Perhubungan perlu di rehab dan dibangun baru untuk meningkatkan yang lingkungan kerja yang lebih nyaman
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di Gadut juga masih merupakan milik Dinas Perhubungan Sumatera Barat, sementara kedua bangunan tersebut memerlukan rehabilitasi dengan dana yang cukup besar, disamping itu peralatan yang digunakanpun memerlukan peremajaan.
3. Beberapa traffic light yang berada di Bukittinggi merupakan milik Propinsi dan ATCS dan CCTV yang berada di Bukittinggi belum merupakan asset pemerintah Kota Bukittinggi .
4. Banyaknya even- even yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sehubungan dengan Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Kota pendidikan dan Kota Perdagangan , memerlukan penanganan lalu lintas yang cepat, tepat dan tidak menimbulkan kemacetan, sementara kendaraan operasional yang ada tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana gedung parkir sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Semoga penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 ini akan dapat memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bersama unit kerja, dinas dan instansi terkait serta perangkat kota dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Terima kasih.

Bukittinggi, April 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI



Drs.ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP:196303021986031034